



DOI: <https://doi.org/10.38035/jimt.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis *Flypaper Effect* di Provinsi Sumatera Barat

Widy Rahma Putri¹, Yurniwati²

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia, widyrahmaputri01@gmail.com

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia, yurniwati_febunand@yahoo.co.id

Corresponding Author: widyrahmaputri01@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the effect of local own-source revenue and transfer funds on regional expenditure and community welfare, examine the mediating role of regional expenditure, and identify the Flypaper Effect phenomenon in regencies and cities in West Sumatra Province. The study uses a quantitative approach with panel data consisting of 95 observations from 19 regencies and cities during the period 2020-2024. Data were obtained from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance and analyzed using panel data regression and the Sobel test. The results show that transfer funds have a positive and significant effect on regional expenditure, while local own-source revenue has no significant effect on regional expenditure. Regional expenditure has a positive and significant effect on community welfare, whereas local own-source revenue and transfer funds have no direct effect on community welfare. The mediation test indicates that regional expenditure does not mediate the effect of local own-source revenue on community welfare, but significantly mediates the effect of transfer funds on community welfare. Furthermore, the study confirms the occurrence of the Flypaper Effect because the effect of transfer funds on regional expenditure is greater than the effect of local own-source revenue.*

Keyword: *Fiscal Decentralization, Flypaper Effect, Regional Original Income, Transfer Funds, Regional Expenditure, Public Welfare*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer terhadap belanja daerah dan kesejahteraan masyarakat, menguji peran mediasi belanja daerah, serta mengidentifikasi fenomena Flypaper Effect pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang terdiri atas 95 observasi dari 19 kabupaten/kota selama periode 2020-2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel dan uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer tidak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Uji mediasi menunjukkan bahwa belanja daerah tidak memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi memediasi secara signifikan pengaruh dana transfer terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian membuktikan terjadinya

Flypaper Effect karena pengaruh dana transfer terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Belanja Daerah, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyediaan pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah (Oates, 1999). Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menegaskan pentingnya keseimbangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Meskipun penelitian mengenai *Flypaper Effect* telah berkembang, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Daerah untuk mengidentifikasi apakah pemerintah daerah lebih responsif terhadap sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dibandingkan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Di sisi lain, penelitian mengenai kesejahteraan masyarakat cenderung menguji pengaruh PAD, Dana Transfer, atau Belanja Daerah terhadap kesejahteraan secara langsung. Dengan demikian, penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji hubungan fiskal dan outcome pembangunan secara terpisah, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme yang menghubungkan sumber daya fiskal dengan kesejahteraan masyarakat melalui proses pengalokasian Belanja Daerah.

Kesenjangan tersebut penting karena penerimaan fiskal tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PAD dan Dana Transfer merupakan sumber daya fiskal yang harus ditransformasikan melalui keputusan penganggaran dan Belanja Daerah sebelum menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan. Oleh karena itu, pengujian pengaruh langsung sumber penerimaan daerah terhadap kesejahteraan belum dapat menjelaskan apakah sumber daya fiskal tersebut benar-benar efektif ditransmisikan menjadi outcome pembangunan. Penempatan Belanja Daerah sebagai variabel mediasi memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi apakah sumber daya fiskal hanya meningkatkan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah atau benar-benar diterjemahkan menjadi pengeluaran publik yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini tidak hanya menguji keberadaan *Flypaper Effect*, tetapi juga menguji peran Belanja Daerah sebagai variabel mediasi dalam mentransmisikan pengaruh PAD dan Dana Transfer terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Pendekatan ini membedakan penelitian ini dari penelitian yang hanya mengidentifikasi respons Belanja Daerah terhadap sumber penerimaan daerah atau menguji pengaruh langsung sumber fiskal terhadap kesejahteraan. Dengan mengintegrasikan kedua hubungan tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan tidak hanya apakah terjadi ketergantungan Belanja Daerah terhadap Dana Transfer, tetapi juga bagaimana sumber daya fiskal tersebut diterjemahkan melalui Belanja Daerah menjadi outcome kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diterapkan pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024, sehingga memberikan bukti empiris mengenai mekanisme transmisi fiskal dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik kapasitas fiskal dan ketergantungan transfer yang beragam.

Fenomena tersebut masih menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Meskipun tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan kemandirian daerah, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih menggantungkan pembiayaan pembangunan pada transfer pemerintah pusat. Kondisi ini dapat mengurangi insentif pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sehingga menghambat terciptanya kemandirian fiskal yang menjadi tujuan utama desentralisasi (Oates, 1999). Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer juga berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah apabila alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada program-program yang produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang masih menunjukkan dominasi Dana Transfer dalam struktur pendapatan daerah kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil statistik deskriptif penelitian ini, rata-rata nilai logaritma Dana Transfer sebesar 27,41 lebih tinggi dibandingkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 25,39. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat. Di sisi lain, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia sebagai proksi kesejahteraan masyarakat sebesar 74,53 menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia antarwilayah masih bervariasi sehingga efektivitas pengelolaan fiskal daerah menjadi aspek yang penting untuk dikaji.

Dalam perspektif teori keuangan publik, pendapatan pemerintah tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan harus dikonversi terlebih dahulu menjadi belanja pemerintah yang produktif (Musgrave, 1959). Pandangan tersebut sejalan dengan *Capability Approach* yang dikemukakan oleh Sen (1999), yang menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi oleh kemampuan masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, belanja daerah menjadi mekanisme penting yang menghubungkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Belanja Daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Alves dan Araujo (2024) menemukan bahwa Dana Transfer memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja pemerintah daerah dibandingkan pendapatan lokal sehingga mengindikasikan adanya *Flypaper Effect*. Abdul Halim dkk. menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan belanja pemerintah daerah yang lebih produktif. Sementara itu, Diana dkk. (2021) menemukan bahwa efektivitas belanja daerah berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat masih memerlukan kajian empiris, khususnya dengan mempertimbangkan peran belanja daerah sebagai variabel mediasi.

Penelitian ini berfokus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020-2024. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada relevansinya untuk mengkaji hubungan antara kapasitas fiskal, Belanja Daerah, dan Kesejahteraan Masyarakat dalam konteks desentralisasi fiskal. Perbedaan kapasitas fiskal antardaerah serta ketergantungan terhadap Dana Transfer memberikan konteks empiris yang relevan untuk menguji keberadaan *Flypaper Effect* sekaligus mekanisme transmisi sumber daya fiskal melalui Belanja Daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori (*explanatory research*) yang bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Belanja Daerah, dan Kesejahteraan Masyarakat serta menguji keberadaan fenomena *Flypaper Effect* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder berbentuk data panel yang

merupakan gabungan data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* terdiri atas 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan data *time series* mencakup periode 2020–2024 sehingga diperoleh 95 observasi penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (*census sampling*), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian karena jumlahnya relatif terbatas dan seluruh data tersedia secara lengkap selama periode pengamatan. Dengan demikian, sampel penelitian terdiri atas 19 kabupaten/kota selama lima tahun pengamatan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi resmi pemerintah. Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Daerah diperoleh melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penggunaan data dari sumber resmi dilakukan untuk menjamin validitas dan reliabilitas informasi yang digunakan dalam penelitian.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat, yang diprosisikan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel independen terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer, sedangkan Belanja Daerah berperan sebagai variabel mediasi (*intervening*). Penelitian ini juga memasukkan Jumlah Penduduk dan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol untuk mengurangi potensi bias akibat karakteristik demografis dan kondisi ekonomi masing-masing daerah. Variabel keuangan berupa PAD, Dana Transfer, Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan PDRB per kapita ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (*natural logarithm*) untuk mengurangi perbedaan skala data, meningkatkan normalitas distribusi, serta mengurangi potensi heteroskedastisitas.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak *EViews 13*. Tahapan analisis diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi data panel melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model terbaik di antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas guna memastikan model memenuhi asumsi dasar regresi.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi data panel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Persamaan pertama digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Belanja Daerah dengan memasukkan variabel kontrol Jumlah Penduduk dan PDRB per kapita. Persamaan kedua digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan tetap mengikutsertakan variabel kontrol.

Model empiris yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Persamaan I

$$\text{LNBDit} = \alpha + \beta_1 \text{LN PADit} + \beta_2 \text{LN DTit} + \beta_3 \text{LN JPit} + \beta_4 \text{LN PDRBit} + \varepsilon_{it}$$

Persamaan II

$$\text{KMit} = \alpha + \beta_1 \text{LN PADit} + \beta_2 \text{LN DTit} + \beta_3 \text{LN BDit} + \beta_4 \text{LN JPit} + \beta_5 \text{LN PDRBit} + \varepsilon_{it}$$

Peran mediasi Belanja Daerah dianalisis menggunakan *Sobel Test* untuk mengetahui signifikansi pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Daerah. Sementara itu, pengujian *Flypaper Effect* dilakukan dengan membandingkan besarnya koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Belanja Daerah. Fenomena *Flypaper Effect* dinyatakan terjadi apabila

koefisien Dana Transfer lebih besar daripada koefisien Pendapatan Asli Daerah serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri atas 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020-2024 sehingga diperoleh 95 observasi. Variabel yang dianalisis meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Belanja Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	KM	LN PAD	LN DT	LN BD	LN JP	LN PDRB
Mean	74.53095	25.38817	27.40791	27.58923	5.410127	3.912110
Median	73.67000	25.27829	27.43563	27.57019	5.495979	3.911823
Maximum	84.38000	32.60795	28.18095	28.52493	6.860852	4.542976
Minimum	63.71000	24.17763	26.76478	26.95284	4.030695	3.333632
Std. Dev.	4.776921	0.954679	0.373270	0.376625	0.799403	0.296333
Skewness	0.140511	4.765776	-0.034047	0.378181	-0.192164	0.092839
Kurtosis	2.408867	35.93273	1.920642	2.525695	1.852419	2.102457
Jarque-Bera	1.695797	4652.686	4.629869	3.154988	5.797569	3.325240
Probability	0.428314	0.000000	0.098773	0.206492	0.055090	0.189641
Sum	7080.440	2411.876	2603.752	2620.977	513.9621	371.6505
Sum Sq. Dev.	2144.983	85.67266	13.09706	13.33353	60.07030	8.254465
Observations	95	95	95	95	95	95

Sumber: Hasil olahan Eviews (2026)

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa rata-rata Dana Transfer (27,41) lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (25,39). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Sementara itu, rata-rata Belanja Daerah sebesar 27,59 menunjukkan bahwa kapasitas pengeluaran pemerintah daerah relatif mengikuti besarnya sumber pendapatan yang diterima. Temuan ini memberikan indikasi awal mengenai masih tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer pusat sehingga relevan untuk menguji keberadaan fenomena *Flypaper Effect*.

Hasil Regresi Data Panel

Persamaan I: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Belanja Daerah (H1 dan H2)

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel, model terbaik yang digunakan pada Persamaan I adalah Random Effect Model (REM). Pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Hasil estimasi regresi dibawah ini.

Dependent Variable: LN_BD
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/05/26 Time: 22:25
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.299628	1.946108	2.723194	0.0078
LN_PAD	0.012375	0.007799	1.586706	0.1161
LN_DT	0.743081	0.078341	9.485199	0.0000
LN_JP	0.141263	0.039360	3.588995	0.0005
LN_PDRB	0.215967	0.034928	6.183225	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.041919	0.3974
Idiosyncratic random			0.051623	0.6026
Weighted Statistics				
R-squared	0.926990	Mean dependent var		13.30969
Adjusted R-squared	0.923745	S.D. dependent var		0.191622
S.E. of regression	0.052915	Sum squared resid		0.252001
F-statistic	285.6772	Durbin-Watson stat		1.430392
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.967673	Mean dependent var		27.58923
Sum squared resid	0.431039	Durbin-Watson stat		0.836260

Sumber: Hasil olahan Eviews, 2026

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga H1 ditolak. Koefisien PAD sebesar 0,012375 dengan nilai probabilitas 0,1161 mengindikasikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum mampu mendorong peningkatan belanja daerah secara nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih belum bertumpu pada sumber pendapatan asli daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1999) yang menyatakan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya melalui sumber pendapatan sendiri. Rendahnya pengaruh PAD terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa tujuan kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, menurut Musgrave (1959), pendapatan pemerintah merupakan instrumen untuk menjalankan fungsi alokasi melalui pengeluaran pemerintah. Apabila penerimaan daerah belum mampu meningkatkan belanja pemerintah, maka fungsi alokasi tersebut belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Abdul Halim (2017) yang menyatakan bahwa pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, PAD belum menjadi faktor utama dalam menentukan besarnya belanja daerah karena kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan dana transfer.

Dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, ketidaksignifikanan PAD terhadap Belanja Daerah dapat mengindikasikan bahwa perubahan PAD belum cukup kuat untuk menjadi penentu utama perubahan kapasitas belanja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PAD sebagai sumber penerimaan daerah belum secara otomatis menjadikan pemerintah daerah lebih leluasa meningkatkan pengeluarannya. Ketika ruang fiskal daerah masih lebih banyak ditentukan oleh Dana Transfer, perubahan PAD yang relatif lebih kecil tidak serta-merta mengubah pola pengeluaran pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil ini tidak hanya menunjukkan bahwa PAD secara statistik tidak signifikan, tetapi

juga mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal belum menjadi faktor dominan dalam menentukan respons Belanja Daerah di wilayah penelitian.

Sebaliknya, Dana Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga H2 diterima. Koefisien sebesar 0,743081 menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah yang relatif besar.

Kuatnya pengaruh Dana Transfer terhadap Belanja Daerah perlu dipahami dalam konteks struktur fiskal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata Dana Transfer dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan PAD, sehingga transfer menjadi sumber fiskal yang relatif lebih dominan dalam membentuk kapasitas pengeluaran pemerintah daerah. Dalam kondisi demikian, perubahan Dana Transfer akan lebih mudah diterjemahkan menjadi perubahan ruang belanja dibandingkan perubahan PAD. Artinya, respons Belanja Daerah yang tinggi terhadap transfer tidak semata-mata mencerminkan besarnya koefisien regresi, tetapi juga menunjukkan adanya struktur pembiayaan daerah yang masih bergantung pada sumber fiskal eksternal.

Hasil ini mendukung teori *Fiscal Federalism* yang menjelaskan bahwa transfer antar pemerintah bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (Oates, 1999). Namun demikian, dominasi dana transfer dalam menentukan belanja daerah juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai aktivitas pemerintahan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alves dan Araujo (2024) yang menemukan bahwa transfer antarpemerintah memiliki pengaruh lebih besar terhadap pengeluaran pemerintah daerah dibandingkan pendapatan asli daerah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Solikin (2016) yang menunjukkan bahwa dana transfer merupakan determinan utama belanja daerah di Indonesia.

Persamaan II: Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat (H3, H4, dan H5)

Berdasarkan hasil pengujian model, Persamaan II menggunakan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik. Hasil estimasi regresi dibawah ini.

Dependent Variable: KM
Method: Panel Least Squares
Date: 07/05/26 Time: 23:55
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-61.94075	30.30927	-2.043624	0.0447
LN_PAD	-0.018548	0.055923	-0.331663	0.7411
LN_DT	0.111796	1.083899	0.103143	0.9181
LN_BD	1.729010	0.795022	2.174795	0.0330
LN_JP	12.13112	4.039986	3.002762	0.0037
LN_PDRB	5.251781	0.892199	5.886333	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995986	Mean dependent var	74.53095
Adjusted R-squared	0.994685	S.D. dependent var	4.776921
S.E. of regression	0.348251	Akaike info criterion	0.942282
Sum squared resid	8.610811	Schwarz criterion	1.587472
Log likelihood	-20.75839	Hannan-Quinn criter.	1.202987

F-statistic	765.8847	Durbin-Watson stat	1.142929
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olahan Eviews, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sehingga H3 diterima. Koefisien sebesar 1,729010 menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah merupakan titik penting dalam proses transformasi sumber daya fiskal menjadi outcome pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, sumber penerimaan daerah baru memiliki konsekuensi terhadap kesejahteraan ketika telah diwujudkan dalam bentuk pengeluaran pemerintah. Belanja pada sektor pelayanan publik dan pembangunan menjadi instrumen yang memungkinkan sumber daya fiskal diterima masyarakat dalam bentuk manfaat yang lebih konkret. Oleh karena itu, signifikannya pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat memberikan dasar empiris bagi dugaan bahwa hubungan antara sumber penerimaan daerah dan kesejahteraan tidak berlangsung secara otomatis, tetapi melalui mekanisme pengeluaran pemerintah.

Temuan tersebut sesuai dengan teori Keuangan Publik Musgrave (1959) yang menyatakan bahwa pemerintah menjalankan fungsi alokasi melalui pengeluaran publik untuk menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Hasil ini juga mendukung teori *Capability Approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1999). Menurut teori tersebut, kesejahteraan masyarakat meningkat apabila pemerintah mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak melalui kebijakan publik.

Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Diana et al. (2021) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sehingga H4 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diikuti oleh pengalokasian anggaran yang efektif.

Hal tersebut sejalan dengan teori Musgrave yang menyatakan bahwa pendapatan pemerintah hanyalah sumber pembiayaan, sedangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat bergantung pada bagaimana pendapatan tersebut dialokasikan melalui pengeluaran pemerintah.

Selain itu, Dana Transfer juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sehingga H5 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa dana transfer belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Dana transfer baru memberikan dampak apabila terlebih dahulu direalisasikan dalam bentuk belanja pemerintah yang produktif.

Temuan tersebut menimbulkan persoalan empiris yang penting: apabila Dana Transfer terbukti meningkatkan Belanja Daerah tetapi tidak meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat secara langsung, melalui mekanisme apa sumber daya fiskal tersebut menghasilkan outcome pembangunan? Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara penerimaan fiskal dan kesejahteraan perlu dilihat melalui proses intermediasi pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, penerimaan daerah merupakan sumber daya awal, sedangkan Belanja Daerah merupakan mekanisme yang mengubah sumber daya tersebut menjadi program, pelayanan, dan pembangunan yang dapat memengaruhi kesejahteraan. Argumentasi inilah yang kemudian diuji melalui analisis mediasi.

Analisis Mediasi Belanja Daerah (H6 dan H7)

Pengujian mediasi dilakukan menggunakan Sobel Test.

Temuan utama penelitian ini terletak pada peran Belanja Daerah sebagai mediator penuh dalam hubungan antara Dana Transfer dan Kesejahteraan Masyarakat. Dana Transfer tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, tetapi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Belanja Daerah selanjutnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Uji Sobel juga menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan Dana Transfer dengan kesejahteraan tidak berlangsung secara langsung, melainkan sepenuhnya melalui proses pengalokasian Dana Transfer ke dalam Belanja Daerah.

Temuan tersebut memberikan makna yang lebih penting daripada sekadar membuktikan adanya hubungan mediasi. Dana Transfer pada dasarnya merupakan instrumen pembiayaan yang meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah, bukan outcome pembangunan itu sendiri. Tambahan transfer baru dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ketika pemerintah daerah mampu mengalokasikannya menjadi Belanja Daerah yang menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Transfer tidak secara otomatis menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor yang menentukan adalah bagaimana tambahan kapasitas fiskal tersebut diterjemahkan melalui keputusan pengeluaran pemerintah.

Dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, temuan ini menggeser perhatian dari persoalan kuantitas Dana Transfer menuju kualitas Belanja Daerah. Ketika Dana Transfer meningkat tetapi tidak menghasilkan pengaruh langsung terhadap kesejahteraan, tambahan sumber daya fiskal tersebut belum dapat dianggap sebagai keberhasilan kebijakan apabila tidak diikuti oleh alokasi belanja yang efektif dan produktif. Sebaliknya, signifikannya pengaruh Belanja Daerah terhadap kesejahteraan menunjukkan bahwa proses pengalokasian anggaran merupakan tahap yang menentukan apakah kapasitas fiskal benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas transfer fiskal tidak cukup dinilai dari besarnya dana yang diterima pemerintah daerah, tetapi dari kemampuan pemerintah daerah mengubah dana tersebut menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan.

Full mediation tersebut menjadi kontribusi penting penelitian ini karena menunjukkan mekanisme transmisi fiskal yang tidak terlihat apabila analisis hanya berhenti pada pengujian pengaruh langsung. Tanpa memasukkan Belanja Daerah sebagai mediator, hubungan antara Dana Transfer dan Kesejahteraan Masyarakat akan terlihat tidak signifikan sehingga dapat menimbulkan kesimpulan bahwa transfer tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian justru menunjukkan hal yang berbeda: kontribusi transfer terhadap kesejahteraan muncul setelah sumber daya tersebut ditransmisikan melalui Belanja Daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti bahwa persoalan utama bukan hanya seberapa besar sumber daya fiskal yang diterima, tetapi seberapa efektif pemerintah daerah mengonversi sumber daya tersebut menjadi belanja yang menghasilkan outcome pembangunan.

Implikasinya, peningkatan Dana Transfer perlu diikuti dengan penguatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi Belanja Daerah. Pemerintah daerah tidak cukup hanya meningkatkan kemampuan menyerap anggaran, tetapi perlu memastikan bahwa belanja diarahkan pada program yang memiliki keterkaitan nyata dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif ini, kualitas belanja menjadi lebih penting daripada sekadar besarnya anggaran, karena besarnya sumber daya fiskal tanpa alokasi yang efektif tidak menjamin tercapainya peningkatan kesejahteraan.

Pengujian *Flypaper Effect* (H8)

Pengujian *Flypaper Effect* dilakukan dengan membandingkan besarnya koefisien Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien Dana Transfer sebesar 0,743081 dan signifikan pada tingkat 5%, sedangkan koefisien Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 0,012375 dan tidak signifikan. Dengan demikian, H8 diterima, sehingga terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020-2024.

Flypaper Effect dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai konsekuensi dari struktur fiskal daerah, bukan sekadar perbandingan koefisien PAD dan Dana Transfer. Respons Belanja Daerah yang jauh lebih besar terhadap Dana Transfer menunjukkan bahwa perubahan kapasitas belanja pemerintah daerah lebih sensitif terhadap sumber dana dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap pendapatan yang dihasilkan sendiri. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa ruang fiskal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih lebih banyak ditentukan oleh transfer daripada kemampuan mobilisasi sumber daya lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur fiskal pemerintah daerah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah relatif rendah.

Hasil penelitian ini mendukung teori Hines dan Thaler (1995) mengenai *money sticks where it hits*, yaitu dana transfer cenderung langsung meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Alves dan Araujo (2024) serta Solikin (2016) yang menemukan bahwa fenomena *Flypaper Effect* masih terjadi pada banyak pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Dari perspektif *bureaucratic behavior* Niskanen, respons belanja yang lebih tinggi terhadap Dana Transfer juga dapat dipahami melalui insentif birokrasi untuk mempertahankan dan memperluas kapasitas anggaran serta aktivitas organisasi. Tambahan Dana Transfer dapat memperbesar ruang anggaran pemerintah daerah tanpa memerlukan upaya peningkatan penerimaan daerah yang memiliki konsekuensi politik dan ekonomi langsung terhadap masyarakat. Dalam kondisi demikian, secara teoritis pemerintah daerah dapat memiliki insentif yang lebih kuat untuk menerjemahkan tambahan transfer ke dalam peningkatan belanja daripada menggunakan tambahan tersebut untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Namun, teori tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pemerintah daerah di Sumatera Barat secara aktual memaksimalkan anggaran sebagaimana diasumsikan Niskanen, karena perilaku birokrasi tidak diuji secara langsung dalam penelitian ini. Teori tersebut digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk menjelaskan salah satu kemungkinan mekanisme di balik tingginya respons Belanja Daerah terhadap Dana Transfer.

Selain perilaku birokrasi, *Flypaper Effect* secara teoritis juga dapat berkaitan dengan asymmetric information antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih spesifik mengenai kebutuhan lokal dan proses pengalokasian anggaran dibandingkan pemerintah pusat. Kondisi tersebut secara teoritis dapat menciptakan ruang diskresi dalam menentukan penggunaan tambahan transfer. Dalam kondisi tata kelola dan manajemen keuangan yang belum optimal, ruang diskresi tersebut berpotensi menyebabkan tambahan kapasitas fiskal lebih cepat diterjemahkan menjadi ekspansi belanja daripada peningkatan efisiensi atau penguatan PAD.

Kemungkinan lain adalah adanya kepentingan tertentu dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dapat memengaruhi prioritas belanja. Namun, kemungkinan rent-seeking tersebut tidak dapat dikonfirmasi berdasarkan penelitian ini karena tidak terdapat variabel yang secara langsung mengukur perilaku rent-seeking atau kualitas proses penganggaran. Oleh

karena itu, aspek tersebut lebih tepat dipandang sebagai kemungkinan mekanisme yang perlu diuji dalam penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020-2024. Belanja Daerah lebih responsif terhadap Dana Transfer dibandingkan PAD, yang menunjukkan bahwa kapasitas belanja pemerintah daerah masih lebih dipengaruhi oleh sumber pembiayaan dari pemerintah pusat daripada kemampuan pendapatan daerah sendiri.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa Belanja Daerah memediasi secara penuh pengaruh Dana Transfer terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dana Transfer tidak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan, tetapi pengaruhnya menjadi signifikan ketika ditransmisikan melalui Belanja Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa Dana Transfer pada dasarnya merupakan instrumen pembiayaan, sedangkan dampaknya terhadap kesejahteraan bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dan mengelolanya melalui belanja yang produktif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Implikasinya, kebijakan fiskal daerah tidak cukup diarahkan pada peningkatan jumlah Dana Transfer, tetapi perlu disertai peningkatan kualitas dan efektivitas Belanja Daerah serta penguatan PAD untuk mengurangi ketergantungan fiskal. Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang diterima daerah, tetapi oleh kemampuan pemerintah daerah mengonversi sumber daya tersebut menjadi belanja yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Septianingrum, N. A., Halim, A., & Utami, T. P. (2025). Local expenditure financing response in regencies and municipalities in Indonesia: Analysis of the *Flypaper Effect* phenomenon. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1), 1-17. doi: 10.18196/jai.v26i1.23983.
- Randy, P. and Rahmat, K. (2021). *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman*. *Journal of Economic and Business* vol. 5, no. 1, p. 84, 2021, doi: 10.33087/ekonomis.v5i1.312.

- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. (2025). *Kinerja APBN s.d 31 Mei 2025 Provinsi Sumatera Barat (hlm.6-8)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hines Jr, J. R., & Thaler, R. H. (1995). *Anomalies: The Flypaper Effect*. Journal of economic perspectives, 9(4), 217-226.
- Alves, P. J. H. F., & Araujo, J. M. (2024). *The effects of intergovernmental transfers on the local fiscal incentives of Brazilian municipalities*. Journal of Government and Economics, 13, 100104. doi: 10.1016/j.jge.2024.100104.
- Wallace, E. O. (1999). *An essay on fiscal federalism*. Journal Economic Literature vol. XXXVII, no. September, pp. 1120–1149, 1999, doi: 10.4324/9780203987254.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat 2024*. BPS Provinsi Sumatera Barat. <https://sumbar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2025). *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025*. BPS Provinsi Sumatera Barat. <https://sumbar.bps.go.id>
- Solikin, A. (2016). *Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014)*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(1), 11-25.
- Permai, S. D., Christina, A., & Gunawan, A. A. S. (2021). *Fiscal decentralization analysis that affect economic performance using geographically weighted regression (GWR)*. Procedia computer science, 179, 399-406. doi: 10.1016/j.procs.2021.01.022.
- Kim, H. A. (2018). *Fiscal decentralisation and inclusive growth: Considering education*. doi: 10.1787/9789264302488-8-en.
- Dick-Sagoe, C., & Tingu, E. N. (2021). *Flypaper Effect of intergovernmental transfers and incentives to improve own-source revenue mobilization of local governments in the central region of Ghana*. Open Journal of Social Sciences, 9(08), 434-447. doi: 10.4236/jss.2021.98030.
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). *The impact of fiscal decentralization: A survey*. Journal of Economic Surveys, 31(4), 1095-1129. doi: 10.1111/joes.12182.
- Apriliani, D. M., Fitrijanti, T., & Aryana, K. P. (2025). *Flypaper Effect di Pulau Jawa: Pengaruh pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah terhadap belanja daerah dengan moderasi pertumbuhan ekonomi*. Jurnal Bisnis Mahasiswa, 5(5), 2518-2537.
- Peggy, B. M. and Richard A. M. (2012). *Public Finance In Theory and Practice*, vol. 9, no. 2. 2012. doi: 10.1515/1553-3832.1898.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Płachciak, A. (2017). Sen's concept of development as freedom and the idea of sustainable development. *Annales. Etyka w życiu gospodarczym*, 20(6), 147-156.
- United Nations Development Programme. (1990). *Human Development Report 1990*. Oxford University Press.
- Anand, S., & Sen, A. (1994). *Human Development Index: methodology and measurement*.
- Klugman, J., Rodríguez, F., & Choi, H. J. (2011). *The HDI 2010: new controversies, old critiques*. The Journal of Economic Inequality, 9(2), 249-288. doi: 10.1007/s10888-011-9178-z.
- Inman, R. P. (2016). *The Flypaper Effect*. International Tax and Public Finance, 23(1), 114-139.
- Dougherty, S., Nebreda, A. M., & Mota, T. (2024). *Adapting intergovernmental fiscal transfers for the future: Emerging trends and innovative approaches*. OECD Working Papers on Fiscal Federalism.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga*.
- OECD. (2019). *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*. OECD Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022, "211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus*.
- Dedy, D., Eka, R., Rasyidah, Afridian, W. A., and Fauzan, M. (2021) *Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman*. *Journal Akuntansi dan Manajemen* vol. 16, no. 2, pp. 50–67, 2021, doi: 10.30630/jam.v16i2.116.
- Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). *Narrowing the gap: Dynamics of Indonesia's public expenditure performance in economically lagging districts*. *Economic Analysis and Policy*, 85, 2299-2318. doi: 10.1016/j.eap.2025.03.014.
- Fukuda-Parr, S. (2003). *The human development paradigm: operationalizing Sen's ideas on capabilities*. *Feminist economics*, 9(2-3), 301-317. doi: 10.1080/1354570022000077980.
- Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). *The effect of district own-source revenue and balance funds on public welfare by capital expenditure and economic growth as an intervening variable in Special District of Yogyakarta*. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(1), 54-59. doi: 10.9744/jmk.19.1.54-59.
- Zhan, J. (2016). *Is There a Kuznets Curve in China's Rural Area?—An Empirical Analysis on Provincial Panel Data*. *Open Journal of Social Science*, 4(4), 391–398.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Ulhaq, H. D. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2021*. *Indonesian Accounting Research Journal*, 5(2), 118-129.
- OECD. (2024). *Going Granular with Regional and Municipal Fiscal Data: OECD and EU Countries*. OECD Publishing.
- Fitrianti, R., Zaenal, M., Fattah, S., & Hidayah, N. (2025). *Flypaper Effect: Analysis of financial transfers from the central government to provincial regions in Indonesia*. *Public and Municipal Finance*, 14(1), 54-64. doi: 10.21511/pmf.14(1).2025.05.
- Haykal, M., Murhaban, M., & Indrayani, I. (2024). *Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021*. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 3(1), 33-46.
- Sania, N., Yamin, N. Y., Paranoan, S., & Tanra, A. A. M. (2024). *Dampak Dana Transfer dan Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah*. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 9(1), 247-261. doi: 10.29303/jaa.v9i1.487.
- Wardhana, A., Kharisma, B., Adam, A. M., & Fahd, M. D. (2023). *The Role of Local*

- Governments On Increasing Welfare And Reducing Poverty In The District/City Of West Java*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 187. doi: 10.24843/jekt.2023.v16.i02.p01.
- Irmawati, W. K. (2025). *Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan*. Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan, 8(2), 226–238.
- Ninie, I., & Untung, N. T. (2024). *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Jawa Timur*. Journal of Management and Business (JOMB), 6(1), 189–202. doi: <https://doi.org/10.31539/jomb.v6i1.7137>
- ANALISIS.
- Yulia, H., Himawan, S., & Zaenal, W. A. (2025). *Analysis of the Flypaper Effect on Local Original Revenue, General Allocation Funds, Revenue Sharing Funds and Budget Surplus on Local Expenditure in the Province of West Nusa Tenggara*. Journal of Economics, Business and Accountancy, 8(6), 3002–3021.
- Rauzah, Z., Haykal, M., Naz'aina, N. A., & Ikhyannuddin, I. (2023). *Pengaruh Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 2(1), 68-83. doi: 10.29103/jam.v2i1.10698.
- Hamdani, H. and Zaenudin, Z. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Pengendalian Belanja Pegawai Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat*. Journal Eksplorasi Akuntansi vol. 5, no. 2, pp. 816–832, 2023, doi: 10.24036/jea.v5i2.836.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics. Fouth Edition*, vol. 82, no. 326.
- Funds, L. B. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan , dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2021*. Indonesian Accounting Research Journal, 5(2), 118–129.
- Apriliani, D. (2023). *Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021*. Indonesian Accounting Research Journal, 4(1), 39-50.
- Handrian, D., & Rusmina, C. (2023). *Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Barat Daya*. Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi (KIMFE), 2(2), 486-493.